



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

JL. LETJEND M.T. HARYONO NO 2 TELP. (0741) 61606 FAX. (0741) 62317

PROVIDING SERVICES FOR GOOD GOVERNANCE

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Melaksanakan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah hingga tahun berkenaan. Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dengan semangat dan tekad yang kuat Inspektorat Daerah Provinsi Jambi akan mewujudkan apa yang menjadi Tujuan RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel Partisipatif* yang berorientasi pada Pelayanan Publik. Pada prinsipnya Rencana Kerja ini disusun dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Organisasi.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai sarana panduan agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 ini diucapkan terima kasih.

Jambi, Juli 2022

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, SH
Pembina Utama Madya
NIP.19690818 199703 1 004

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA OPD 2021 - 2026	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD 2016-2021	8
2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan sebelumnya	19
2.3 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Tahun 2021	21
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	28
2.5 Permasalahan Yang Dihadapi	31
2.6 Hambatan dan Kendala	34
2.7 Upaya Pemecahan Masalah	35
2.8 Tantangan dan Peluang	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	34
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	38
3.2 Program dan Kegiatan.....	41
BAB IV PENUTUP	42

LAMPIRAN :

- Lampiran 1 Evaluasi renja Triwulan IV Tahun Anggaran 2021
- Lampiran 2 Matriks Renstra 2021-2026
- Lampiran 3 Renja SIPD Tahun 2022

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah Yang terdapat pada dokumen Renstra	8
Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2006-2021 (Kondisi Per 31 Desember 2021)	11
Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2021	15
Tabel 2.1.3	Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018-2021	16
Tabel 2.2	Capaian Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Pada Renstra sebelumnya Tahun 2021 -2016	19
Tabel 2.4	Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	28
Tabel 2.8	Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 2016 s.d 2022	37
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang Ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	39
Tabel 3.2	Perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan misi I sesuai fungsi Inspektorat Daerah	43
Tabel 3.2.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022	46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hierarkinya rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat dalam dokumen RKPD yang memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selamat setahun yang diperoleh dari Rencana Kerja (Renja) OPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan penyusunan rencana dan program kerja merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan itu sendiri agar bersinergi dan sinkron dalam penyusunan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi tahun 2022 telah berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menyusun Renja Inspektorat dengan mempedomani RPJMD Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Tugas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Pasal 4 adalah Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan oleh perangkat daerah..

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memiliki fungsi, antara lain :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Terwujudnya good governance dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan system perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Penyesuaian dokumen rancangan Perubahan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah Jambi. Program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian anggaran untuk dilaksanakan, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Inspektorat daerah Provinsi Jambi perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program pengawasan dan consulting harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja OPD ini dituangkan melalui beberapa peraturan perundang –undangan, antara lain:

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah;
8. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen perencanaan tahun mendatang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD untuk menyiapkan Renstra OPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan RPJMD dan Renstra OPD, Pokok-pokok isi dokumen Renstra OPD, Status hukum Renstra OPD. Renstra OPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja OPD;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud utama penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan tujuan utama penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah :

- a. Untuk Menjabarkan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra Pemerintah Provinsi Jambi sehingga terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Harmonis;
- b. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah (RPJMD tahun 2021-2026);
- c. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan;
- d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja OPD dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : Evaluasi Renja OPD Tahun 2021

1.1 Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.2 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Evaluasi Renja OPD Tahun 2016-2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD 2016-2021

Berisikan rumusan sasaran-sasaran strategisnya melalui program dan kegiatan pembangunan atas Keberhasilan sasaran Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Renstra OPD.

2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan sebelumnya

Berisikan pencapaian realisasi kinerja OPD pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya.

2.3 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Tahun 2021

Berisikan upaya yang telah dilakukan OPD dalam mencapai Target Kinerja OPD di tahun 2021.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan Strategi dan arah kebijakan OPD yang diselaraskan dengan program pembangunan nasional dan kepala daerah terpilih.

2.5 Permasalahan Yang Dihadapi

Berisikan masalah-masalah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah OPD di tahun 2022.

2.6 Hambatan dan Kendala

Berisikan masalah OPD dalam mencapai target kinerja di tahun 2022.

2.7 Upaya Pemecahan Masalah

Berisikan strategi OPD dalam mengambil kebijakan dimasa akan datang di tahun 2022.

2.8 Tantangan dan Peluang

Berisikan rencana yang diambil OPD dimasa akan datang di tahun 2022.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD yang diselaraskan dengan program nasional dan kepala daerah terpilih.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB 2

EVALUASI RENJA OPD TAHUN 2016-2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD 2016-2021

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2021 telah merumuskan sasaran-sasaran strategisnya melalui program dan kegiatan pembangunan. Keberhasilan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah Yang terdapat pada dokumen Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA 2021 (Renstra)	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2021	Ket
1	2	3		4	5	$6 = (4:5) * 100\%$	6
I	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	1	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100%	100%	100%	Tercapai
		2	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	98%	64,31%	65,61%	Tidak Tercapai
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.	1	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai " B "	70%	93%	132%	Tercapai
		2	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai " B "	45%	81,82%	181,82%	Tercapai
III	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	1	Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal	64%	82%	128%	Tercapai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA 2021 (Renstra)	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2021	Ket
1	2	3		4	5	6 = (4:5) * 100%	6
		"Sangat Tinggi (ST)"					
IV	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	1	Persentase tindaklanjut BPK yang dapat diselesaikan	92%	62,89%	68,35%	Tidak Tercapai
		2	Persentase rekomendasi Itjend yang dapat diselesaikan	100%	84,06%	84,06%	Tidak Tercapai
		3	Persentase rekomendasi Itprov yang dapat diselesaikan	96%	46,21%	48,14%	Tidak Tercapai
V	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat	86%	164%	190%	Tercapai
VI	Meningkatnya Kuailitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,92	83,47	104,44%	Tercapai
		2	Nilai AKIP	62	80,51	129,85%	Tercapai
		3	Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%	Tercapai

Adapun analisis atas capaian kinerja di atas, yaitu :

1) Indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP

Pada indikator Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP, terlihat pada tabel 1 bahwa capaian Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP tahun 2021 di Provinsi Jambi terealisasi 100 % sesuai dengan target.

Upaya meningkatkan laporan keuangan SKPD sesuai dengan SAP di 43 SKPD Pemerintah Provinsi Jambi. dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Pendampingan dan Asistensi, melalui beberapa kegiatan yakni kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, kegiatan pendampingan dan asistensi.

2) Indikator Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi

Rekomendasi nilai temuan keuangan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi dari tahun 2003 s.d tahun 2020 sebesar Rp.204.310.961.147,65 yang bisa ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp135.011.176.359,08 atau sebesar 64,31%.

Upaya meningkatkan penyelesaian nilai temuan keuangan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi ini dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Pendampingan dan Asistensi, melalui beberapa kegiatan yakni kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, kegiatan pendampingan dan asistensi.

3) Indikator Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B"

Untuk realisasi kinerja tahun 2021 diperoleh melalui Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. SKPD yang memiliki nilai minimal B sebanyak 40 (empat puluh) SKPD dan 3 (tiga) OPD memperoleh nilai "CC", sehingga realisasi sebesar 93%. Upaya meningkatkan hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B" dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

4) Indikator Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai "B"

Indikator capaian kinerja Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai "B" dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Realisasi Kinerja tahun 2021 dihitung berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh KEMENPAN RB tahun 2020, Kabupaten/Kota yang memiliki nilai minimal "B" sebanyak 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota dan sebanyak 2 (dua) Kabupaten yang memperoleh nilai "CC" sehingga realisasinya 81,82%

Upaya meningkatkan hasil hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai "B" dilakukan melalui melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

5). Indikator Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi (ST)".

Pengukuran atas capaian kinerja Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi" dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk menghitung realisasi kinerja tahun 2021. Hasil penilaian EKPPD diperoleh berdasarkan Laporan Hasil penilaian EKPPD Kab/Kota Tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, hal tersebut dikarenakan atas proses evaluasi EKPPD Kab/Kota Tahun 2021 belum dilaksanakan dan hasil evaluasi EKPPD Tahun 2019 dan 2020 s.d saat ini belum keluar hasil penilaiannya.

Nilai EKPPD Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Jambi Tahun 2018 bahwa terdapat 9 (sembilan) Kab/Kota yang memperoleh hasil evaluasi sama dengan dan lebih dari 'B', dengan realisasi 82%.

Upaya meningkatkan hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B" dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

6). Indikator Persentase tindaklanjut BPK yang dapat diselesaikan

Rekomendasi Temuan BPK RI dari tahun 2006 s.d Desember 2021 sebanyak 1834 rekomendasi, temuan yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 1159 atau sebesar 62,89, temuan yang belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 485 atau sebesar 26,31%.

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi
Tahun 2006-2021 (Kondisi Per 31 Desember 2021)

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				S	BS	BD	TT
1	2	3	4	5	6	7	8
	TAHUN 2006	45	89	86	3	0	0
1	Pemeriksaan LKPD TA 2005	22	50	49	1	0	0
2	Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 pada KPUD dan Panwas Provinsi Jambi	8	9	9	0	0	0
3	General Audit BPD Jambi Tahun Buku 2005	15	30	28	2	0	0
	TAHUN 2007	57	139	136	3	0	0
4	Pemeriksaan LKPD TA 2006	17	52	51	1	0	0
5	Pemeriksaan Bantuan Parpol TA 2006	3	6	6	0	0	0
6	Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB pada Inspektorat Provinsi Jambi TA 2007	3	3	3	0	0	0
7	Pemeriksaan atas Dana Perimbangan TA 2006 dan 2007	4	11	11	0	0	0
8	Pemeriksaan Operasional BPD Jambi Tahun Buku 2006 dan 2007	14	30	30	0	0	0
9	Pemeriksaan atas Belanja Provinsi Jambi TA 2007	16	37	35	2	0	0
	TAHUN 2008	88	224	219	5	0	0
10	Pemeriksaan LKPD TA 2007	28	72	70	2	0	0
11	Pemeriksaan Pendapatan TA 2008	13	27	27	0	0	0
12	Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan pada RSUD Raden Mattaher TA 2007	19	70	68	2	0	0
13	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) TA 2007 dan 2008 (Semester I)	16	26	26	0	0	0
14	Pemeriksaan Portofolio dan Operasional Keuangan Bank Jambi TA 2008	12	29	28	1	0	0
	TAHUN 2009	43	101	99	2	0	0
15	Pemeriksaan LKPD Provinsi Jambi TA 2008	14	44	43	1	0	0
16	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2009	7	28	27	1	0	0
17	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009	22	29	29	0	0	0
	TAHUN 2010	55	126	110	16	0	0
18	Pemeriksaan LKPD TA 2009	28	64	62	2	0	0
19	Penggunaan Dana STAR SDP pada Inspektorat Provinsi Jambi	3	5	5	0	0	0
20	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2010	3	7	6	1	0	0

21	Pelaksanaan Kerja Sama Kontrak Produksi Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambisapta Manunggal Pratama Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel & Resort	3	5	3	2	0	0
22	Pemeriksaan Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2010 pada KPU, Panwaslu dan Instansi Terkait Lainnya se-Provinsi Jambi	8	16	6	10	0	0
23	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Farmasi, Pemeliharaan Peralatan, dan Rekam Medik dalam Menunjang Pelayanan Kesehatan Paripurna Terpadu Bermutu pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	10	29	28	1	0	0
TAHUN 2011		47	113	88	25	0	0
24	Pemeriksaan LKPD 2010	21	56	45	11	0	0
25	Pemeriksaan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2010	4	7	6	1	0	0
26	Pemeriksaan Atas Pendapatan Daerah TA 2010 dan Semester I TA 2011	8	24	21	3	0	0
27	Pemeriksaan Atas Operasional Bank Tahun 2010 dan 2011 (s.d. 30 Juni 2011) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	8	17	15	2	0	0
28	Pemeriksaan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada PT JII dan PT SPP di Jambi	6	9	1	8	0	0
TAHUN 2012		40	81	58	23	0	0
29	Pemeriksaan LKPD 2011	21	41	29	12	0	0
30	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	4	11	9	2	0	0
31	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesmasda pada Kementerian Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan TA 2010 s.d. Semester I TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Jambi	15	29	20	9	0	0
TAHUN 2013		76	214	147	26	41	0
32	Pemeriksaan LKPD TA 2012	27	82	60	18	4	0
33	Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Manajemen RSUD Raden Mattaher TA 2013	19	49	41	7	1	0
34	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Jambi	8	18	14	1	3	0
35	Pemeriksaan atas Operasional PT BPD Jambi Tahun Buku 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III)	10	21	21	0	0	0
36	Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan dan Reviu LK oleh APIP TA 2012 dan Sem I TA 2013	12	44	11	0	33	0
TAHUN 2014		25	54	35	13	6	0

37	Pemeriksaan LKPD TA 2013	19	42	25	11	6	0
38	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Jambi	6	12	10	2	0	0
	TAHUN 2015	53	108	34	43	31	0
39	Pemeriksaan LKPD TA 2014	19	46	14	21	11	0
40	Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015	8	20	7	6	7	0
41	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III 2015)	6	10	0	0	10	0
42	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Jambi	10	20	13	6	1	0
43	Efisiensi Dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	10	12	0	10	2	0
	TAHUN 2016	52	137	36	42	59	0
44	Pemeriksaan LKPD TA 2015	17	50	29	15	6	0
45	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang Pada Provinsi Jambi TA 2016	8	27	5	16	6	0
46	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Pada Provinsi Jambi TA 2016	7	14	2	11	1	0
47	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 Sampai dengan 2016 pada Pemerintah Provinsi Jambi	9	24	0	0	24	0
48	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Provinsi Jambi	11	22	0	0	22	0
	TAHUN 2017	23	56	31	18	7	0
49	Pemeriksaan LKPD TA 2016	17	44	23	16	5	0
50	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Jambi	6	12	8	2	2	0
	TAHUN 2018	19	55	18	32	5	0
51	Pemeriksaan LKPD TA 2017	14	43	15	28	0	0
52	PDTT Belanja Daerah Provinsi Jambi TA 2018	5	12	3	4	5	0
	TAHUN 2019	41	110	9	60	41	0
53	Pemeriksaan LKPD TA 2018	26	71	2	28	41	0
54	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 – 2018	12	30	3	27	0	0
55	PDTT Belanja Modal Infrastruktur 2019	3	9	4	5	0	0
	TAHUN 2020	37	104	23	81	0	0
56	Pemeriksaan LKPD TA 2019	11	28	5	23	0	0

57	Pemeriksaan Kinerja Efektifitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Intansi Terkait Lainnya (bulan Desember 2020)	9	24	1	23	0	0
58	Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jambi(bulan Desember 2020)	17	52	17	35	0	0
	TAHUN 2021	49	123	30	93	0	0
59	Pemeriksaan LKPD TA 2020	42	98	21	77	0	0
60	Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Samsat TA 2020	7	25	9	16	0	0
	TOTAL	750	1843	1159	485	190	0

Sumber Data : Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan

Upaya meningkatkan persentase tindaklanjut BPK yang dapat diselesaikan ini dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

7). Indikator Persentase rekomendasi ltjend yang dapat diselesaikan

Rekomendasi Temuan Irijend sampai dengan Desember 2021 sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) rekomendasi, temuan yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 58 (lima puluh delapan) rekomendasi atau sebesar 84,06%, dan sebanyak 11 (sebelas) rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti atau sebesar 18,96%.

Tabel 2.1.2

Rekapitulasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TLHP			
				S	BS	BD	TPTD
1	2019	22	36	36	0	0	0
2	2021	14	33	22	11	0	0
	TOTAL	36	69	58	11	0	0

Sumber Data : Inspektorat Jenderal Kemendagri RI

Upaya meningkatkan Persentase rekomendasi ltjend yang dapat diselesaikan ini dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada

kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

8). Indikator Persentase rekomendasi Itprov yang dapat diselesaikan

Rekomendasi Temuan Inspektorat sampai dengan Desember 2021 sebanyak 766 rekomendasi, temuan yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 354 rekomendasi atau sebesar 46,21%.dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebesar 308 rekomendasi atau 40,20%.

Tabel 2.1.3

Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
				Selesai	Dalam Proses	Blm Di TL
1	2018	77	120	93	0	27
2	2019	71	112	48	0	64
3	2020	192	323	105	1	217
4	2021	96	211	108	0	0
TOTAL		436	766	354	1	308

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Upaya meningkatkan Persentase rekomendasi Itprov yang dapat diselesaikan ini dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

9). Indikator Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat

Pengukuran atas capaian kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat Tahun 2020 dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Hitung Jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2021

Adapun jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2021 adalah sebanyak 74 orang

- 2) Hitung Jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2020

Adapun jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2020 adalah sebanyak 59 orang

- 3) Hitung persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat tahun 2021, dengan formula :

Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat tahun 2021 = $((\text{Jumlah aparatur pengawas bersertifikat tahun 2021} - \text{jumlah aparatur pengawas bersertifikat tahun 2020}) : \text{Jumlah aparatur pengawas bersertifikat tahun 2020}) \times 100\%$

Maka,

Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat tahun 2021 = $((74 - 59) : 59) \times 100\% = 25,42\%$

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja : $(\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$

Capaian Kinerja : $(164\% : 86\%) \times 100\%$

Capaian Kinerja : 190%

Upaya meningkatkan Persentase jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat ini dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

10) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada indikator indeks kepuasan masyarakat bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 di Provinsi Jambi dari target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 79,92, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan yaitu :

- a) persyaratan pelayanan;
- b) prosedur pelayanan;
- c) waktu pelayanan;
- d) biaya/tarif pelayanan;
- e) produk/hasil pelayanan;
- f) kemampuan petugas pelayanan;

- g) perilaku petugas pelayanan;
- h) kualitas sarana dan prasarana;
- i) penanganan pengaduan pelayanan;

diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Provinsi Jambi sebesar 83,47 dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,61-88,30.

Upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi ini dilakukan melalui program yaitu:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

11) Indikator Nilai AKIP

Pada tahun 2021 target nilai AKIP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah 80,51 tercapai 129,85%.

12) Indikator Laporan Keuangan sesuai SAP

Pada tahun 2022 Capaian Kinerja atas Laporan Keuangan sesuai SAP tahun 2021 dihitung berdasarkan perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Adapun capaian kinerja atas Laporan Keuangan sesuai SAP tahun 2021 sebesar 100%.

2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan sebelumnya.

Tabel 2.2

Capaian Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada Renstra sebelumnya

Tahun 2016 s.d 2021 terdiri dari sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI												CAPAIAN HINGGA 31 DES 2021	
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	- Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	75%	75%	82%	82%	88%	82%	92%	55,46%	92%	55,46%	98%	64,31%	64,31%	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	- Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B"	61%	13%	63%	9%	65%	7%	67%	23,25%	67%	86%	70%	93%	93%	
		- Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota dengan nilai "B"	9%	0%	18%	0%	27%	36%	36%	73%	36%	73%	45%	81.82%	81.82%	

3.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	- Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi"	27%	91%	36%	100 %	45%	100%	55%	82%	64%	82%	82%
4.	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional.	Persentase Tindak Lanjut Selesai : - BPK - Itjend Kemendagri - Inspektorat Daerah Provinsi	82%	80%	85%	79%	87%	75%	90%	70,08%	92%	62,89%	62,89%
5.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	- Persentase peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	44%	44%	70%	70%	80%	80%	86%	86%	86%	46,21%	46,21%

2.3 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Tahun 2021

Sasaran I : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

1. Indikator Kinerja : Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP adalah sebesar 100%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 100%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Keuangan di 43 OPD.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD secara intens
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan di 43 (empat puluh tiga) OPD sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)

2. Indikator Kinerja : Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov-Jambi

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov-Jambi adalah sebesar 64,31%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 98%. Hal tersebut karena melaksanakan rekomendasi yang terlambat ditindaklanjuti oleh OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjut.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPR.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut dengan OPD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
- 3) Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

Sasaran II : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

1. Indikator Kinerja : Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B adalah sebesar 93%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 70%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan SAKIP di 43 (empat puluh tiga) OPD.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD secara intens.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan SAKIP di 43 (empat puluh tiga) OPD sesuai dengan Permenpan Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP.

2. Indikator Kinerja : Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai "B"

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai "B" adalah sebesar 81,82%, telah mencapai

target yang diinginkan sebesar 45%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan SAKIP di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Biro Organisasi Setda Kabupaten/Kota secara intens
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan SAKIP di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi melalui Biro Organisasi Setda di masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Sasaran III : MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH KAB/KOTA DI PROVINSI JAMBI

Indikator Kinerja : Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi”.

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi” adalah sebesar 82%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 64%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Biro Pemerintahan Otda Setda Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi secara intens.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Dokumen LPPD di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi melalui Biro Pemerintah Otda Setda di masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Sasaran IV : MENINGKATNYA PENYELESAIAN TLHP APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL

1. Indikator Kinerja : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah sebesar 62,89%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 92%. Hal tersebut karena melaksanakan rekomendasi yang terlambat dan belum ditindaklanjuti oleh OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjuti.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPR.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut dengan OPD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
- 3) Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

2. Indikator Kinerja : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri adalah sebesar 84,06%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Hal tersebut karena melaksanakan rekomendasi yang terlambat dan belum ditindaklanjuti oleh OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjuti

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPR.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut dengan OPD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
- 3) Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

3. Indikator Kinerja : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi adalah sebesar 46,21%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 96%. Hal tersebut karena melaksanakan rekomendasi yang terlambat dan belum ditindaklanjuti oleh OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjut

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPR.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut dengan OPD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.

- 3) Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

Sasaran V : MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS

Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat adalah sebesar 164%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 86%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP dan Kemendagri secara intens terhadap jadwal pendidikan dan pelatihan APIP selama masa pandemi covid-19.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi dengan BKN Regional IV dan BKD Provinsi Jambi dalam penangkatan Inpassing Auditor dan P2UPD di lingkup Inspektorat Provinsi Jambi.
- 3) Menyediakan Fasilitas Pembelajaran dengan *Sistem Daring* dan *Luring* untuk pemeriksa APIP Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Sasaran VI : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

1. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi atas Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 83,47 telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 79,92. Hal tersebut

karena salah satu Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai *Providing Service For A Good Governace*.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan pengaduan dengan media telepon, internet, surat kabar, foto
- 2) Memberikan pelatihan dan asistensi sesuai dengan kebutuhan kegiatan dimasing-masing OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
- 3) Menerima konsultasi masyarakat di bidang pengawasan.

2. Indikator Kinerja : Nilai AKIP

Realisasi atas Indikator kinerja Nilai AKIP adalah sebesar 80,51, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 62 Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan AKIP Provinsi Jambi.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi secara intens.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan AKIP Provinsi Jambi kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

3. Indikator Kinerja : Laporan Keuangan sesuai SAP

Realisasi atas Indikator kinerja Laporan Keuangan sesuai SAP adalah sebesar 100%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 100%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Jambi.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi secara intens.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Biro Pengelolaan BMD Setda Provinsi Jambi secara intens.
- 3) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Table 2.4
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT, (MANTAP)				
MISI : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan				
1.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel dengan aparatur	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	Efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pengawas yang profesional dan berintegritas.			
		Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif	a. Meningkatkan pendampingan dan asistensi Penerapan SPIP Perangkat Daerah b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu penerapan SPIP Perangkat Daerah	Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif.
			Optimalisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sebagai Bagian dari Perwujudan Budaya Integritas	a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah; b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; c. Survei Prespektif Corruption.
			Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah; b. Meningkatkan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi; c. Melakukan penilaian Perangkat Daerah.
			Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi; b. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan pembangunan zona integritas; c. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi; d. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja.
			Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Evaluasi Perangkat Daerah
			Peningkatan dan Penguatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Melaksanakan Koordinasi dan Supervisi terhadap Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Peningkatan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	a. <i>Assurance Activities</i> b. <i>Consulting/Advisory Activities</i> c. <i>Anti Corruption Activities</i>
			Peningkatan mutu pengawasan intern Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	a. Implementasi rencana aksi (<i>action plan</i>) peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Jambi b. Melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan
			Penerapan manajemen PNS	a. Menyusun peta kompetensi SDM b. Pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam / tahun per APIP. c. Penegakan kode etik dan disiplin APIP d. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016)

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021 - 2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

2.5 Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam upaya menciptakan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik Tahun 2021 terdapat hambatan dan permasalahan yang secara langsung tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan namun secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian kinerja. Hambatan dan kendala tersebut antara lain :

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas seluruh kegiatan pengawasan intern. Berdasarkan daftar rekapitulasi TLHP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sampai tahun 2021, diketahui jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah 5.982 rekomendasi, dengan rincian:

- Selesai ditindaklanjuti sebanyak 5.345 rekomendasi (89,35%);
- Dalam Proses tindaklanjut sebanyak 82 rekomendasi (1,37%); dan
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 555 rekomendasi (9,28%).

2. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jambi

Salah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah dengan membangun sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif sesuai dengan amanat Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada :

- Pasal 47 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
- Pasal 47 ayat (2) : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;
 - 2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor LAP/05/PW05/3/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal laporan hasil *Quality Assurance* (QA) atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Jambi berada pada level “Terdefinisi” dengan nilai maturitas SPIP sebesar 3,000 (level 3).

Pada tingkat “Terdefinisi” berarti pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern belum didukung dokumentasi yang memadai. Dengan adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan menunjukkan indikator bahwa SPIP belum sepenuhnya diterapkan/diselenggarakan secara efektif. Hal ini merupakan tugas bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah.

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagian auditan masih rendah terutama terkait pelaksanaan kegiatan utama Perangkat Daerah (*core business*) belum sepenuhnya memenuhi prinsip ekonomis, efektif dan efisien

4. Akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dari hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah pada tahun 2020, masih terdapat 3 (tiga) perangkat daerah dengan nilai “CC”, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman beberapa perangkat daerah terhadap penerapan SAKIP.

5. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Belum Optimalnya peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*, sebagaimana diketahui terkait perubahan paradigma APIP dari *watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *consulting Partner* sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi pelaksanaannya masih belum sesuai harapan, khususnya dalam menyikapi peran sebagai *Consulting Partner*.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/101/M/A.A.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 disimpulkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2020 masih berada pada kategori “B” dengan nilai “62,32”. Tingkatan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut menunjukkan kategori B dengan predikat cukup baik yang mempunyai interpretasi bahwa penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi menjelaskan bahwa terdapat hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya peran APIP sebagai *quality assurance and consulting* masih belum optimal. Atas hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, maka hal yang perlu disempurnakan terkait tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu mengoptimalkan peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*. *Quality Assurance* dan *Consulting* diharapkan bukan hanya terkait dengan keuangan, tetapi juga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kinerja setiap Perangkat Daerah.

6. Sumber Daya Manusia

- a. Sumber Daya Manusia pemerintahan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai di sektor publik dari aspek fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian atau pengawasan. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sampai dengan saat ini belum memadai dari segi kuantitas dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang semakin berat dan kompleks dan dengan adanya penambahan Inspektur Pembantu IV dan Inspektur Pembantu Khusus berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sehingga diperlukan APIP yang memadai dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Saat ini terdapat Pejabat Fungsional Auditor 30 (tiga puluh) orang dan Pejabat Fungsional PPUPD 44 (empat puluh empat) orang dengan jumlah objek pemeriksaan sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit kerja dan 11 (sebelas) kabupaten/kota, sehingga terdapat keterbatasan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan baik itu pengawasan atas kinerja seluruh Perangkat Daerah maupun untuk menangani kasus-kasus pengaduan dari Pemerintah dan Gubernur.
- b. Standar kompetensi profesional SDM Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi.
Masih kurangnya APIP yang belum memiliki sertifikasi profesi di bidang pengawasan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

2.6 Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 antara lain masih terbatasnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, kompeten dan berintegritas sehingga proses koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan belum maksimal baik secara intern di dalam lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan ektern di dalam lingkup Inspektorat dengan SKPD, Obrik, dan Masyarakat.

2.7 Upaya Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir masalah adalah antara lain :

1. Melakukan Pembinaan Pengawasan terhadap SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga terjadi peningkatan intensitas pengawasan SKPD di Lingkup Provinsi Jambi.
2. Melakukan Assistensi dan Pendampingan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan cara Mendorong SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.
3. Melaksanakan Supervisi terhadap Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Peningkatan dan Penguatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Memfasilitasi SKPD dalam Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional secara berkala dalam Mendorong SKPD agar segera menyelesaikan rekomendasi TLHP Aparat Pengawasan Fungsional.
5. Mengirimkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk mengikuti Diklat Teknis Pengawasan dan Diklat Non Teknis Lainnya sehingga tercapai Peningkatan Sumber Daya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang lebih berkualitas

2.8 Tantangan dan Peluang

1. Tantangan (*challenge*)

1) Penerapan aplikasi sistem pengawasan yang terintegrasi

Pelaksanaan pengawasan saat ini belum berbasis aplikasi sehingga pelaksanaan pengawasan masih dilakukan secara manual dengan meminta *hardcopy* pada auditi serta pengumpulan dan penataan Data Base Pengawasan dilakukan secara manual.

Dalam rangka melaksanakan Misi Gubernur Jambi untuk Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi, maka Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan harus didukung dengan aplikasi sistem pengawasan yang terintegrasi.

2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya kebaikan tatakelola pemerintahan. Tatakelola pemerintah yang baik adalah prasyarat utama pembangunan. Kualitas tatakelola pemerintahan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan semakin baik tatakelola pemerintahan suatu daerah semakin cepat pula pembangunan. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga terwujudnya transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, bersih, dan melayani.

3) Meningkatkan Sinergitas APIP dengan APH

Dalam melakukan koordinasi penanganan laporan dan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel diperlukan peningkatan Sinergitas Kerjasama antara APIP dan APH.

4) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Memastikan APIP memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas sebagai APIP yang kompeten dan profesional.

2. Peluang (*Opportunity*)

- 1) Terdapatnya peraturan perundangan-undangan tentang:
 - Perencanaan pengawasan
 - Reformasi birokrasi
- 2) MOU Sinergitas kerjasama APIP dan APH
- 3) Tersedianya lembaga-lembaga pendidikan APIP yang profesional
- 4) Adanya komitmen yang tinggi dari Gubernur tentang Pentingnya Peran dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Adapun perencanaan pembinaan dan pengawasan pada Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Jambi selama 6 tahun dari tahun 2016 s/d 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.8
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 2016 s.d 2022

No.	OBRIK	TAHUN							JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	SKPD	45	43	43	43	43	43	43	301
2.	KASUS	21	34	34	16	16	16	16	153
3.	KAB/KOTA	11	11	11	11	11	11	11	77
JUMLAH		77	88	88	70	70	70	70	531

Sedangkan untuk tahun 2022 direncanakan pembinaan dan pengawasan pada lingkup Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 70 obrik binaan pengawasan, yaitu :

- a) 43 SKPD
- b) 11 Kasus
- c) 11 Kabupaten/Kota

BAB 3

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

Rencana Kerja yang disingkat Renja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang disusun untuk satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dimana untuk Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 disusun masih mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

Untuk mendukung misi Gubernur Jambi “memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung oleh e-government yang terintegrasi”, dengan tujuan “mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel dengan pelayanan publik berkualitas”. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, maka Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya maka tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah “mewujudkan tata kelola Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur pengawas yang professional dan berintegritas.”

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

N O	TUJUAN (2)	INDIKATOR TUJUAN (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR SASARAN (5)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)	2024 (9)	2025 (10)	2026 (11)
(1)				(5)						
	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur pengawas yang professional dan berintegritas.	Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan			1.6	1.8	2.1	2.2	2.3	2.5
			1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	89,35%	90,00%	90,50%	91,00%	91,50%	92,00%
				Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
				Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset	N/A	60%	65%	70%	75%	80%

					93,02 %	95%	97%	98%	99%	100%
				Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B"	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
			2. Meningkatkan tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
				Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	N/A	3	3	3	4	4
				Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi	10%	15%	20%	25%	30%	35%

3.2 Program dan Kegiatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program ini yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah Pembayaran Gaji dan tunjangan.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Persentasi Jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat dan telah mengikuti diklat pengawasan.

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini yaitu Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah pengadaan barang Milik daerah.

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah barang milik daerah yang terpelihara

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program ini yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Laporan Hasil Pengawasan Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus dan Klarifikasi Kasus, Persentase Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Laporan Perkembangan Hasil Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar Rekomendasi Hasil Pengawasan.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Laporan Hasil Pengawasan.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program ini yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pengawasan dan Hasil Fasilitasi Pengawasan.

b. Pendampingan dan Asistensi

Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Pelaksanaan Pendampingan Asistensi.

Tabel 3.2

Perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan misi I sesuai fungsi Inspektorat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel	Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	92,00%	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	Efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 4	Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif	a. Meningkatkan pendampingan dan asistensi Penerapan SPIP Perangkat Daerah b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu penerapan SPIP Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
				Optimalisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sebagai Bagian dari Perwujudan Budaya Integritas	a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah. b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar c. Survei Perspektif Corruption	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
				Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi b. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan pembangunan zona integritas	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis,

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
					c. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi d. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja	Pendampingan dan Asistensi - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset	80%	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Meningkatkan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi c. Melakukan penilaian Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
		Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B".	100 %	Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Evaluasi Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi	Level 4	Peningkatan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	a. <i>Assurance Activities</i> b. <i>Consulting/Advisory Activities</i> c. <i>Anti Corruption Activities</i>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
		Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	4	Peningkatan mutu Pengawasan intern Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	a. Implementasi rencana aksi (<i>action plan</i>) peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Jambi b. Melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi	35%	Penerapan manajemen PNS	a. Menyusun profil kompetensi SDM b. Pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam / tahun per APIP. c. Penegakan kode etik dan disiplin APIP d. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 3.2.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Tahun 2022		Kinerja perubahan periode Tahun 2022		Selisih
					Target	Rp.	Target	Rp	Rp
URUSAN PENGAWASAN						36.000.000.000,00		37.741.877.537,00	1.741.877.537,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan			Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT		72%	7.053.214.837,00		7.454.520.457,00	401.305.620,00
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal		72%	5.737.551,680,00		6.216.003,635,00	478.451.955,00
	1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	52 Lap	1.742.043,560,00		1.345.893,560,00	- 396.150.000,00
	2)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	39 Lap	861.310,060,00		1.531.509,060,00	670.199.000,00
	3)	Reviu Laporan Kinerja	3)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	21 Lap	146.038,000,00		125.758,00,00	-20.280.000,00
	4)	Reviu Laporan Keuangan	4)	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	55 Lap	289.208,000,00		520.778.060,00	231.570.060,00
	5)	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	5)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	21 Lap	1.723.046,860,00		1.543.284,755,00	-179.762.105,00

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Tahun 2022		Kinerja perubahan periode Tahun 2022		Selisih
					Target	Rp.	Target	Rp	Rp
	6)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6)	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	155 Dok	975.905,200,00		1.148.780.200,00	172.875.000,00
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	1.315.663,157,00		1.238.516,822,00	-77.146.335,00
	1)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1)	Jumlah Laporan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2 Lap	249.379,545,00		163.743,210,00	-85.636.335,00
	2)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	19 Lap	1.066.283.612,00		1.074.773,612,00	8.490.000,00
Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi			Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"		38%	3.178.579,100,00		2.684.903,400,00	- 493.675.700,00
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan		17	457.426,400,00		45.930,000,00	- 411.496.400,00
	1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1)	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	17	457.426,400,00		45.930,000,00	-411.496.400,00
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi		100%	2.721.152,700,00		2.638.973,400,00	-82.179.300,00
	1)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	43 PD	259.059,300,00		223.200,000,00	-35.859.300,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2022

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Tahun 2022		Kinerja perubahan periode Tahun 2022		Selisih
					Target	Rp.	Target	Rp	Rp
	2)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 PD	191.523,660,00		165.483,660,00	-26.040,000,00
	3)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	46 Keg	2.043.164,880,00		2.043.164,880,00	0,00
	4)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3 PD	227.404,860,00		207.124,860,00	-20.280.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			Nilai AKIP		B	25.768.206,063,00		27.602.453,680,00	1.834.247.617,00
1	Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang Selesai dirumuskan		21 Dok	1.336.309,946,00		1.182.197,846,00	-154.112.100,00
	1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	1.201.310,092,00		979.004,992,00	-222.305.100.00
	2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	2)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Dok	134.999,854,00		203.192,854,00	68.193.000,00.
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	16.965.911,011,00		18.707.788,548,00	1.741.877.537,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2022

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Tahun 2022		Kinerja perubahan periode Tahun 2022		Selisih
					Target	Rp.	Target	Rp	Rp
	1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang	16.965.911,011,00		18.707.788,548,00	1.741.877.537,00
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100%	2.917.273,632,00		2.750.239,632,00	-167.034.000,00
	1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	2.917.273,632,00		2.750.239,632,00	-167.034.000,00
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja		100%	1.787.638,252,00		2.111.209,963,00	323.571.711,00
	1)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.087,545,00		35.087,545,00	0,00
	2)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	89.030,118,00		89.030,118,00	0,00
	3)	Penyediaan barang logistik kantor	3)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Paket	138.955,000,00		151.075,000,00	12.120.000,00
	4)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	116.142,200,00		85.856,300,00	-30.285.900,00
	5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Paket	25.927.920,00		5.285.280,00	-20.642.640,00
	6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Lap	1.382.495,469,00		1.744.875,720,00	362.380.251,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2022

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Tahun 2022		Kinerja perubahan periode Tahun 2022		Selisih
					Target	Rp.	Target	Rp	
	7)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	0,00		0,00	0,00
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah		100%	944.524,888,00		1.009.470,068,00	64.945.680,00
	1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0,00		0,00	0,00
	2)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	210 Unit	944.524.888,00		1.009.470.568,00	64.945.680,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor		100%	880.861.334,00		799.325.123,00	- 81.536.211,00
	1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	71.490.222,00		94.270.810,00	22.780.590,00
	2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	229.957.170,00		193.299.970,00	- 36.657.200,00
	3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	18.120.000,00		19.170.000,00	1.050.000,00
	4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Lap	561.293.944,00		492.584.343,00	- 68.709.601,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara		100%	935.687.000,00		1.042.222.000,00	106.535.000,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2022

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Tahun 2022		Kinerja perubahan periode Tahun 2022		Selisih
					Target	Rp.	Target	Rp	Rp
	1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	303.260.000,00		269.130.000,00	-34.130.000,00
	2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	153.710.000,00		182.080.000,00	28.370.000,00
	3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	170 Unit	177.377.800,00		120.197.800,00	-57.180.000,00
	4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	301.339.200,00		470.814.200,00	169.475.000,00

BAB 4

PENUTUP

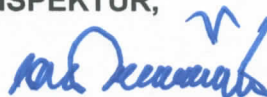
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi selama 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra Pemerintah Provinsi Jambi sehingga terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Harmonis, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi ini dapat menjadi acuan sementara dalam menyusun dokumen perencanaan selanjutnya, baik yang tertuang dalam RKA-KL dan DPA OPD berdasarkan pagu indikatif 2022.

Jambi, Juli 2022

INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, S.H

Pembina Utama Madya

NIP.19690818 199703 1 004

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Lerjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606-Fax. (0741) 62317
J A M B I - 36122

Jambi, 24 Januari 2022
Jumadil Akhir 1443 H

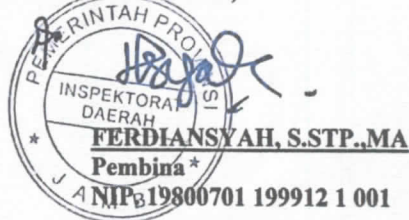
Nomor : S-700/02 /ITPROV-1.1/I/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Evaluasi Renja Triwulan IV
Tahun Anggaran 2021

Kepada
Yth. Gubernur Jambi
Cq. Kepala Bappeda Provinsi
Jambi
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor :
S.061.055/Bappeda-2.3/I/2022 Tanggal 10 Januari 2022 Perihal Permintaan
Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami sampaikan
Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2021 Inspektorat Daerah Provinsi
Jambi (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima
kasih.

Plt. INSPEKTUR,



Tembusan Yth :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

EVALUASI RENJA INSPERATORAT DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2021

No	Uraian/Isi Uraian Peningkatan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Target Rencana s.d 2023		Realisasi capaian Kinerja Rencana s.d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Tahunan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021/22		GPO Penanggung Jawab
			K		K		K		I		II		III		IV		K		K		
			Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

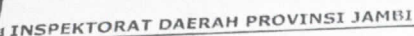
No	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra s.d 2023		Realisasi capaian Kinerja Renstra s.d Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Tahunan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2021(%)		OPD Penanggung Jawab							
									I		II		III		IV													
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12 = 11/6*100		13							
	Perumusan Kebijakan Tataca di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Tataca Pengawasan dan Hasil Fasilitas Pengawasan			0,00	Rp	-	80%	Rp	276.691.700	8,09%	Rp	29.250.000	17,67%	Rp	101.501.780	37,82%	Rp	104.021.700	67,40%	158.814.620	142,57%	Rp	264.486.444		142,67	Inspektoral Provinsi Jambi	
	Perumusan Kebijakan Tataca di Bidang Pengawasan	Jumlah peraturan bidang pengawasan	100%	Rp	6.000.000.000	91,82	Rp	2.028.592.262	3 SK	Rp	66.694.700	0	Rp	-	8,84%	Rp	27.364.380	95,64%	Rp	66.892.788	96,81%	57.957.660	241,19%	Rp	141.126.000	0	241,19	
	Perumusan Kebijakan Tataca di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah peraturan bidang fasilitas pengawasan	100%	Rp	4.000.000.000	95,20	Rp	1.709.994.530	6 SK	Rp	218.167.080	10,73%	Rp	29.250.000	27,22%	Rp	74.237.380	32,47%	Rp	40.016.980	48,23%	100.857.060	118,14%	Rp	283.363.420	2 SK	118,14	Inspektoral Provinsi Jambi
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Pendampingan Asistensi	90%	Rp	2.100.000.000	83,12	Rp	318.397.732	100%	Rp	1.444.229.620	1,38%	Rp	33.000.000	10,67%	Rp	298.192.256	29,64%	Rp	428.110.050	57,50%	630.448.975	107,3%	Rp	1.848.781.388		107,31	Inspektoral Provinsi Jambi
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pendampingan penyusunan Laporan dan Perkembangan Hasil Evaluasi Pelaksanaan, Pemberantasan Pengaduan Laka	6 SK Gub dan 59 SK Rprov	Rp	4.900.000.000	4 SK Gub dan 225K Rprov	Rp	233.196.417	100%	Rp	843.889.820	2,29%	Rp	33.000.000	13,82%	Rp	192.173.388	26,88%	Rp	218.579.888	84,67%	540.437.775	116,49%	Rp	973.888.888	18,38%	116,49	Inspektoral Provinsi Jambi
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pertibalan Reformasi Birokrasi	Persentase SKPD Produktif	6 SK Gub dan 30 SK Rprov	Rp	4.900.000.000	4 SK Gub dan 225K Rprov	Rp	831.086.001	48%	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0,00%	Rp	-	0	-	0%	Rp	-	0%	0,00	Inspektoral Provinsi Jambi
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase laporan hasil evaluasi						100%	Rp	498.982.000	0	Rp	-	11,11%	Rp	78.020.000	31,83%	Rp	158.899.200	48,07%	238.671.200	95,30%	Rp	473.889.480	0	88,38	Inspektoral Provinsi Jambi	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Integritas	Jumlah SKPD Produktif						10 SKPD	Rp	103.760.000	0	Rp	-	0	Rp	-	48,29%	Rp	51.140.000	49,29%	51.140.000	98,57%	Rp	103.388.880	0	88,67	Inspektoral Provinsi Jambi	
								Rp	28.184.643.764		Rp	3.508.603.470		Rp	10.674.490.581		Rp	18.288.850.177		28.786.893.442		Rp	59.207.627.670					
																						Persentase Anggaran Anggaran per Desember 2021			91,77%			





Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023-2025																			
Tajuk	Indikator Tajuk	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Contoh Perhitungan													
						Kendali Kinerja Pada Awal Periode Rencana GPQ / Tahun 2023		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kendali Kinerja Pada Akhir Periode Rencana GPQ / Tahun 2025	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				UTUSAN PEMBERAWASAN			36.321.792.882,80		36.191.761.888,80		36.846.526.155,81		37.362.854.810,76		38.831.538.477,40		38.886.868.353,81		39.368.581.658,53
Menghasilkan satu buku Penerbitan Peranti Jambi yang berisi kegiatan, aktivitas dan laporan dengan spesifikasi program yang	Indikator Reformasi Bidang/ Bidang Program Pengembangan	Terwujudnya satu buku penerbitan yang berisi kegiatan, aktivitas dan laporan	Persentase Pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	Program Pengembangan Program	Persentase Pelaksanaan Program	100%	1.631.783.465,80	100%	3.045.347.172,80	100%	3.181.825.343,54	100%	3.226.338.176,33	100%	3.312.151.781,63	100%	3.371.588.811,18	100%	34.164.888.738,78
			Target Akutansi SPP	1. Laporan Pengembangan Program	Persentase Pelaksanaan Program	100%	8.326.488.885,80	100%	7.536.853.488,80	100%	8.807.854.172,80	100%	8.807.375.637,73	100%	8.178.353.434,86	100%	8.218.858.881,18	100%	48.488.888.888,88
			Persentase penerbitan Perangkat Daerah yang berperan "terbuka" dalam penerbitan	2. Program Kerja Penerbitan Daerah	1. Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang diterbitkan	100%	2.037.351.888,00	100%	1.815.388.000,00	100%	1.853.363.700,00	100%	1.862.438.548,30	100%	1.881.363.472,37	100%	1.888.888.888,88	100%	3.312.312.312,31
			Persentase target kerja evaluasi SAMP yang terdapat dalam satu tahun	3. Program Kerja Penerbitan Daerah	2. Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang diterbitkan	100%	631.363.062,00	100%	1.534.548.000,00	100%	1.615.158.800,00	100%	1.622.535.598,30	100%	1.636.784.164,47	100%	1.643.384.548,37	100%	1.188.888.888,88
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	4. Renc. Laporan Kinerja	3. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	312.500.553,00	100%	121.000.000,00	100%	106.815.000,00	100%	127.503.375,00	100%	128.784.664,77	100%	129.638.503,03	100%	697.347.347,34
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	5. Renc. Laporan Kinerja	4. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	563.181.884,00	100%	297.500.000,00	100%	329.822.500,00	100%	337.375.562,50	100%	338.384.178,17	100%	339.495.503,50	100%	1.888.888.888,88
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	6. Renc. Laporan Kinerja	5. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.033.886.362,00	100%	2.666.438.000,00	100%	2.736.636.000,00	100%	2.768.333.488,00	100%	2.787.152.718,88	100%	2.798.874.388,87	100%	11.188.888.888,88
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	7. Renc. Laporan Kinerja	6. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.818.603.000,00	100%	1.818.603.000,00	100%	1.842.842.842,00	100%	1.851.021.217,53	100%	1.861.438.348,10	100%	1.875.388.388,88	100%	8.338.888.888,88
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	8. Renc. Laporan Kinerja	7. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	9. Renc. Laporan Kinerja	8. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	10. Renc. Laporan Kinerja	9. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	11. Renc. Laporan Kinerja	10. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	12. Renc. Laporan Kinerja	11. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	13. Renc. Laporan Kinerja	12. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	14. Renc. Laporan Kinerja	13. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	15. Renc. Laporan Kinerja	14. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	16. Renc. Laporan Kinerja	15. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	17. Renc. Laporan Kinerja	16. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	18. Renc. Laporan Kinerja	17. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	19. Renc. Laporan Kinerja	18. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	20. Renc. Laporan Kinerja	19. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	21. Renc. Laporan Kinerja	20. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	22. Renc. Laporan Kinerja	21. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	23. Renc. Laporan Kinerja	22. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	24. Renc. Laporan Kinerja	23. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	25. Renc. Laporan Kinerja	24. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	26. Renc. Laporan Kinerja	25. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	27. Renc. Laporan Kinerja	26. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	28. Renc. Laporan Kinerja	27. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	29. Renc. Laporan Kinerja	28. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	30. Renc. Laporan Kinerja	29. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	31. Renc. Laporan Kinerja	30. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	32. Renc. Laporan Kinerja	31. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	33. Renc. Laporan Kinerja	32. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	34. Renc. Laporan Kinerja	33. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	35. Renc. Laporan Kinerja	34. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	36. Renc. Laporan Kinerja	35. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	37. Renc. Laporan Kinerja	36. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	38. Renc. Laporan Kinerja	37. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	39. Renc. Laporan Kinerja	38. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	40. Renc. Laporan Kinerja	39. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	41. Renc. Laporan Kinerja	40. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80
			Persentase pelaksanaan kegiatan di satu bidang penerbitan	42. Renc. Laporan Kinerja	41. Persentase Laporan Hasil Renc. Laporan Kinerja yang diterbitkan	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187.347.372,80	100%	1.187				

[illegible]

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

				2	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Kinerja Kinerja dan Materi rekrutasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja dan Laporan Kinerja SKPD	11	154.553.854,00	11	171.900.000,00	11	168.264.500,00	11	161.063.642,50	11	161.445.870,11	11	166.753.607,34	11	169.475.840,58
				2	Kepolisian Administrasi Kewaspadaan Perangko Daerah	Persentase Pemonevian Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15.506.911.653,00	100%	15.506.911.653,00	100%	15.817.854.815,78	100%	16.504.800.800,00	100%	17.800.800.800,00	100%	17.504.800.800,00	100%	18.533.961.914,70
					1) Pengecekan Gaji dan Tunjangan ASN	1) Persentase Pemonevian Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15.506.911.653,00	100%	15.506.911.653,00	100%	15.817.854.815,78	100%	16.500.000.000,00	100%	17.300.000.000,00	100%	17.500.000.000,00	100%	18.525.961.914,70
				3	Kepolisian Administrasi Kepengawasan Perangko Daerah	Persentase APF yang menginput Pendidikan dan Pekerjaan	100%	3.433.544.632,00	100%	3.433.544.632,00	100%	3.433.544.632,00	100%	3.433.544.632,00	100%	3.433.544.632,00	100%	3.433.544.632,00	100%	17.433.533.864,00
					1) Pendidikan dan Pekerjaan Pegawai Berkebutuhan Khusus dan Tunjangan	1) Persentase APF yang menginput Pendidikan dan Pekerjaan 120 Jawab/Penginputan	100%	3.433.544.632,00	100%	3.433.544.632,00	100%	3.433.544.632,00	100%	3.433.544.632,00	100%	3.433.544.632,00	100%	3.433.544.632,00	100%	17.433.533.864,00
				4	Kepolisian Administrasi Layanan Perangko Daerah	Persentase Pemonevian Survei dan Pasaran Kerja	100%	1.834.844.243,00	100%	2.144.844.243,00	100%	2.174.545.246,63	100%	2.187.817.732,64	100%	2.271.825.844,81	100%	2.334.423.232,66	100%	18.953.888.734,60
					1) Pengecekan keabsahan instansi struktur/penempatan bagian/instansi	1) Persentase Pemonevian Komponen Instansi Lisensi/penempatan bagian/instansi	100%	31.815.405,00	100%	31.815.405,00	100%	32.282.636,00	100%	32.454.029,26	100%	32.779.640,25	100%	33.036.436,65	100%	16.241.200,25
				2)	Pengecekan perizinan dan perizinan Kantor	2) Persentase pemonevian ATK Perizinan dan Perizinan Kantor	100%	68.417.118,00	100%	68.417.118,00	100%	69.804.274,77	100%	70.253.236,11	100%	71.571.623,11	100%	72.067.287,40	100%	471.257.503,42
				3)	Pengecekan barang registrasi kantor	3) Persentase Pemonevian Abkasan dan Monevian	100%	172.955.000,00	100%	172.955.000,00	100%	173.543.325,00	100%	176.427.071,63	100%	178.391.342,24	100%	179.873.251,79	100%	683.035.534,75
				4)	Pengecekan barang cetak dan penggunaan	4) Persentase Pemonevian Barang Cetak dan Penggunaan	100%	124.660.400,00	100%	124.660.400,00	100%	126.530.906,00	100%	127.862.957,53	100%	128.454.547,11	100%	129.738.532,58	100%	636.597.883,61
				5)	Pengecekan Buku Buku dan Perizinan Perizinan-monevian	5) Persentase Pemonevian Buku Buku dan Perizinan Perizinan- Monevian	100%	25.927.320,00	100%	25.927.320,00	100%	26.916.636,00	100%	26.448.422,33	100%	26.732.507,22	100%	26.980.626,30	100%	132.306.125,31
				6)	Pengawasan Rapor Koordinasi dan Koordinasi SKPD	6) Persentase Pemonevian Rapor- Rapor dan Koordinasi ke Luar Daerah	100%	1.447.128.400,00	100%	1.432.328.400,00	100%	1.474.071.626,00	100%	1.481.381.005,13	100%	1.436.125.702,00	100%	1.511.657.641,00	100%	2.114.493.476,15
				1)	Delapan Pelaksanaan Sistem Pemonevian Berbasis Elektronik pada SKPD	1) Persentase Pemonevian Aplikasi Pemonevian	100%	N/A	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	253.750.000,00	100%	257.500.000,00	100%	261.125.000,00	100%	1.712.725.041,15
				5	Kepolisian Pengawasan Barang Mili Daerah Pemonevian Urusan Pemonevian Daerah	Persentase Pemonevian Kebutuhan Barang Mili Daerah	100%	2.453.501.363,00	100%	2.234.800.800,00	100%	1.850.800.800,00	100%	354.800.800,00	100%	504.800.800,00	100%	504.800.800,00	100%	4.234.800.800,00

[illegible]

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatf
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Lokasi						Target Kinerja Program dan Kelompok Sasaran													
Tahun	Indikator Tahunan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kendali Kinerja Pada Awal Periode Rencana RPJ / Tahun 2021		Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kendali Kinerja Pada Akhir Periode Rencana RPJ / Tahun 2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				URUSAN PERUMAHAN			36.327.732.342,00		36.791.747.636,00		36.846.526.031,87		37.862.634.330,78		38.881.534.177,36		39.896.863.933,81		40.912.981.653,31
				Program Pemeliharaan Perumahan	Persentase Pemeliharaan Perumahan	100%	7.631.703.465,00	100%	8.465.335.172,00	100%	9.180.625.343,50	100%	9.336.558.176,33	100%	9.333.333.781,63	100%	9.371.588.871,78	100%	9.366.846.179,04
				Target Matriks RPJ	1. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Internal	100%	6.534.462.653,60	100%	7.534.623.686,68	100%	8.051.684.057,68	100%	8.631.379.617,73	100%	8.719.353.234,06	100%	8.715.343.031,48	100%	8.646.636.204,04
					2. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Eksternal	100%	2.027.551.640,00	100%	1.629.860.000,00	100%	1.853.368.700,00	100%	1.682.536.546,50	100%	1.847.262.302,33	100%	1.833.943.039,57	100%	1.832.336.330,33
					3. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	631.865.050,00	100%	1.504.540.000,00	100%	1.415.438.000,00	100%	1.632.135.580,50	100%	1.626.780.744,41	100%	1.613.964.546,07	100%	1.603.336.330,33
					4. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	375.330.551,00	100%	125.000.000,00	100%	126.175.000,00	100%	127.589.375,00	100%	128.784.456,75	100%	129.430.330,00	100%	127.337,33
					5. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	563.161.860,00	100%	267.500.000,00	100%	291.712.500,00	100%	293.871.582,50	100%	296.304.278,00	100%	297.661.000,00	100%	1.046.473,00
					6. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.033.696.860,00	100%	2.469.430.000,00	100%	2.726.636.000,00	100%	2.740.328.000,00	100%	2.747.732.744,00	100%	2.740.571.436,67	100%	13.708.229,67
					7. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.618.651.000,00	100%	1.810.651.000,00	100%	1.642.682.657,00	100%	1.651.697.371,33	100%	1.647.629.344,00	100%	1.617.368.067,00	100%	6.296.086,00
					8. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					9. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					10. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					11. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					12. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					13. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					14. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					15. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					16. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					17. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					18. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					19. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					20. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					21. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					22. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					23. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					24. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					25. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					26. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					27. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					28. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					29. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					30. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					31. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					32. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					33. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					34. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					35. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					36. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					37. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					38. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					39. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					40. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					41. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					42. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					43. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					44. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					45. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					46. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					47. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					48. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.187.52.5372,00	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50	100%	1.183.531.182,50
					49. Kegiatan Pemeliharaan Perumahan Lainnya	100%	1.187.52.5372,00	100%											



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI																			
Keperluan ini akan Pemerintah Pusat Anda yang berak, insurans, asuransi dan biaya dengan gubernur provinsi yang profesional dan keuntungan.	Anda: Gubernur Daerah Dalam Pemerintah Provinsi	Tersebut dan sudah pemerintah yang berak, insurans, asuransi dan biaya	Tingkat Menteri DPM	Program Perantara Kelembagaan Tabung, Pemerintahan dan Asuransi	Pemerintah Perantara Kelembagaan Tabung yang asuransi reforma, asuransi tabung "B"	253	2.334.183.826,00	362	2.334.326.000,00	431	2.318.910.000,00	461	2.338.417.375,00	531	2.365.043.875,00	601	2.401.167.375,00	681	2.441.558.475,00
			Pemerintah provinsi Perantara Daerah yang asuransi, asuransi dan biaya dengan gubernur provinsi yang profesional dan keuntungan.	1. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan dan Fasilitas Pemerintahan	Anda: Kelembagaan Tabung yang asuransi reforma, asuransi tabung "B"	1	114.551.150,00	11	620.800.000,00	2	620.800.000,00	1	632.448.368,00	1	632.448.368,00	1	645.770.368,00	41	1.165.616.134,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	2. Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	2	114.551.150,00	11	620.000.000,00	2	620.000.000,00	1	632.448.368,00	1	632.448.368,00	1	645.770.368,00	41	1.165.616.134,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	3. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	3	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	3	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	4. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	4	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	4	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	5. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	5	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	5	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	6. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	6	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	6	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	7. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	7	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	7	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	8. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	8	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	8	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	9. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	9	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	9	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	10. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	10	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	10	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	11. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	11	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	12. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	12	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	12	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	13. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	13	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	13	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	14. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	14	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	14	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	15. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	15	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	15	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	16. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	16	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	16	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	17. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	17	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	17	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	18. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	18	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	18	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	19. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	19	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	19	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	20. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	20	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	20	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	21. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	21	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	21	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	22. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	22	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	22	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	23. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	23	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	23	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	24. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	24	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	24	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	25. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	25	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	25	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	26. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	26	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	26	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	27. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	27	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	27	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	28. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	28	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	28	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	29. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	29	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	29	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	30. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	30	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	30	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	31. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	31	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	31	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	32. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	32	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	32	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	33. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	33	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	33	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	34. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	34	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	34	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	35. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	35	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	35	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	36. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	36	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	36	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	37. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	37	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	37	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	38. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	38	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	38	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	39. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	39	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	39	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	40. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	40	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	40	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	41. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	41	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	42. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	42	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	42	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	41	1.170.422.000,00
			Pemerintah provinsi hasil reforma SAMP perantara di bidang asuransi tabung	43. Ekspansi Perantara Kelembagaan Tabung di Bidang Pemerintahan	Anda: Perantara di Bidang Pemerintahan	43	1.170.422.000,00	11	1.170.422.000,00	43	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170.422.000,00	1	1.170		

[illegible]

RENSTRA TAYLOR CO. -

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target			
6																
6	01															
6	01	01														
6	01	01	1.01													
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	70 persen	3 Dokumen	20 Dokumen	39.856.080,952	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP	70 persen	43.931.754,059
6	01	01										28.167.017,218				31.073.673,948
6	01	01	1.01									267.408,429				294.149,281
6	01	01	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	70 persen		20 Dokumen	148.499,830	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)	Nilai SAKIP	70 persen	163.349,823
6	01	01	1.02									17.057.603,023				18.763.363,325
6	01	01	1.02	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							17.057.603,023	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			18.763.363,325
6	01	01	1.05									3.849.983,095				4.324.981,405
6	01	01	1.05	09	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							3.849.983,095	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			4.324.981,405
6	01	01	1.06									2.085.670,272				2.294.192,298
6	01	01	1.06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah							34.996,550	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			38.496,204
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							97.324,830	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			107.057,313
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							190.250,500	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			209.275,550
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							137.126,440	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			150.839,084
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							28.520,712	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			31.327,783
6	01	01	1.06	09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							1.597.451,240	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			1.757.196,364
6	01	01	1.07									2.705.451,506				2.975.996,656
6	01	01	1.07	02	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							32.153,000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			35.368,300

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							2,673,298,506	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			2,940,628,356	
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							950,626,813				1,045,689,495	
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							72,089,402	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			79,298,342	
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							293,463,687	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			322,810,056	
6	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							19,932,000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			21,925,200	
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							565,141,724	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			621,655,897	
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,250,274,080				1,375,301,488	
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							333,586,000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			366,944,600	
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							169,081,000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			185,989,100	
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							193,306,080	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			212,636,688	
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							554,301,000	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			609,731,100	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							8,394,895,812				9,234,385,395	
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal							7,176,842,303				7,894,526,534	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							2,241,086,826	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			2,465,195,509	
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							981,187,966	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			1,079,306,763	
6	01	02	1.01	03	Revisi Laporan Kinerja							410,729,279	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			451,802,206	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi
Tahun 2022

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan							619,499,276	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			681,449,204	
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota							1,143,874,776	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			1,258,262,254	
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							1,780,464,180				1,958,510,598	
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu							1,218,053,509				1,339,858,861	
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah							89,534,896	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			98,488,386	
6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu							1,128,518,613	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			1,241,370,475	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							3,294,167,922				3,623,694,716	
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan							631,790,632				694,969,696	
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan							331,809,566	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			364,990,523	
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan							299,981,066	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			329,979,173	
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi							2,662,377,290				2,928,725,020	
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							1,538,840,226	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			1,692,724,249	
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							196,334,026	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			218,167,429	
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							752,284,072	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			827,622,479	
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penerapan Integritas							172,918,966	PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD)			190,210,863	
TOTAL												39,856,080,952					43,931,754,059